

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pengaruh *money politic* terhadap perilaku masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dalam pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan, yang dimana masyarakat di daerah ini sangat berpengaruh atas berjalannya *money politic* dikarenakan *money politic* dikalangan masyarakat sangatlah tidak asing lagi di telinga masyarakat setempat

*Money politic* sendiri mendapat peran utama saat si calon kandidat berkampanye dan bersosialisasi ketempat-tempat yang rentang dengan masyarakat yang kurang mengerti atau bisa dibilang sama sekali tidak mengenal dengan politik, namun gejala *money politic* mendominasi masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah dan pendidikan yang kurang memadai, seperti masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati yang bisa disebut perekonomian dan pendidikan yang sangat cukup dibilang rendah.

*Money politic* sangat berpengaruh penting di masyarakat tersebut, minimnya pendidikan dan perekonomian membuat masyarakat memilih mensukseskan berjalannya *money politic*, dan melihat masyarakat di daerah Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dimana masyarakatnya merupakan perekonomiannya menengah ke bawah dimana masyarakat dilingkungan tersebut sebagian besar pedagang kaki lima, pegawai

serabutan dan pengangguran dan lainnya, sedikit sekali masyarakat setempat yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan gaji yang tetap.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di daerah ini, dan masyarakat disana rata-rata perekonomiannya cukup dibidang rendah, dimana ketidakmampuan untuk memenuhi dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan lapangan pekerjaan yang kurang memadai sehingga sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi kemiskinan tersebut lah memaksa *money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk segera mendapat uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan visi-misi si calon kandidat tersebut sehingga tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Sehingga masyarakat disetempat tidak berpikiran untuk memikirkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, karenanya masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati hanya sebagian yang mengetahui tentang politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang timbulkan dari politik. Itu disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah ataupun di masyarakat. Sehingga ketika ada pesta politik, mereka pun, tidak mengenal partai, tidak tahu calon anggota legislatif pun tidak masalah, kondisi inilah

---

<sup>1</sup>.M, Tetuko Nadigo Putra AT. Skripsi “Upaya Penanggulangan Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung” Bandar Lampung 2018

yang membuat masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati *money politik* berjalan dengan lancar.

Topo Santoso, menjelaskan tentang berjalannya *money politic*, menurutnya, *money politik* dikaitkan dengan suap menyuap dengan sasaran memenagkan satu kandidat dengan cara apapun termasuk bejalanya *money politic*, perekonomian dan pendidikan cukup sangat berpengaruh tinggi untuk menjalankan suatu *money politic* karenanya masyarakat yang kurang mampu dan pendidikan yang kurang memadai adalah salah satu sasaran bagi calon kandidiat untuk mengambil hati para masyarakat yang akan memilih calon-calon kandidiat tersebut, sehingga masyarakat tidak menyadari adanya permainan poltik yang sebenarnya justru akan merugikan diri mereka sendiri.<sup>2</sup>

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensi para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktik politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga ternyata dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang menjelang Pilkada. Terjadinya politik uang dikarenakan saat ini masyarakat mulai dipengaruhi oleh pemikiran yang rasional dalam memandang partisipasi politik. Praktik politik uang dalam partisipasi politik telah mampu dijelaskan melalui teori pilihan rasional James S. Coleman.

---

<sup>2</sup>. Firiyah “*Cara Kerja Politik Uang (Studi kasus pilkada dan pilkades dikabupaten pati)*” Semarang 2015

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apa penyebab berjalannya *money politic* masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengidentifikasi pengaruh *money politics* terhadap perilaku memilih masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) 2018 di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Mengidentifikasi berjalannya cara kerja *money politic*

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian sumber ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan dan pelaksanaan mengenai upaya pengaruhnya *money politic* dan

berjalannya *money politic* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sumatera Selatan

**b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan sejumlah uang yang ditawarkan dalam medekati pilkada, dan diharapkan dapat membuka mata masyarakat untuk memilih kehendak mereka bukan karena faktor uang dan lain-lain.

**D. Tinjauan Pustaka**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan menjadi pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi tonggak tegaknya demokrasi, masyarakat juga sangat berperan penting dalam pemilihan umum ini, dikarenakan masyarakat ini lah yang akan mensukseskan berjalannya pemilihan umum.

Jurnal Hj. Rahmatiah HL, Dosen fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar . “*Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*” menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat yang menghasilkan pemerintahan menjadi yang demokrasi. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah jangan sampai para calon wakil rakyat

hanya merakyat pada saat masa kampanye saja, pendekatan yang biasanya dilakukan untuk mengambil hati rakyat, khususnya ketika menjelang pencoblosan wakil rakyat tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam kasus tersebut. Masyarakat idealnya dapat berfikir lebih pintar dan logis dalam menyikapi fenomena tersebut, karena pemilu merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil rakyat secara langsung berdasarkan keputusan ideal dan rasional tanpa intervensi materi atau *money politik*.<sup>3</sup>

Edi Nasution “*Perselingkuhan Antara Politik dan Uang (Money Politic) Menciderai Sistem Demokrasi*” Politik dan uang merupakan dual hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik, dalam praktiknya politik uang dimaknai masyarakat tidak hanya pada aspek transaksionalnya saja, tetapi juga terhadap makna-makna fungsionalnya. Kemiskinan yang dapat membuat kesengsaraan hidup manusia, dan oleh karena itu, pemilih dapat berubah (dibeli) dengan adanya praktik uang, bukan lah pembenaran untuk terus berlangsungnya keterpurukan demokrasi di Negara kita. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk undang-undang tindak pidana korupsi (UU TPK) dan undang-

---

<sup>3</sup>. Hj. Rahmatilah HL. “*Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*” Dosen Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2015

undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana uang (UU PP TPPU), maka para pelaku politik uang itu akan dapat dihukum.<sup>4</sup>

Fitriyah “*Cara Kerja Politik Uang (Studi kasus pilkada dan pilkades di kabupaten pati)*” Menjelaskan bagaimana kerja praktik politik uang dalam pilkada secara langsung menunjukkan kecenderungan makin menguat sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survey. Topo Santoso memberi penjelasan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori politik uang, menurutnya biasanya *money politic* dikaitkan dengan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan. Padahal sebenarnya jika dilihat secara lebih luas *money politic* dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana didalam konteks politik (termasuk masalah kerpartaian dan pemilu). memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi, adapula bentuk-bentuk lainnya yang juga melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya mendapatkan dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal itu. aktor-aktor yang terlibat dalam praktek politik uang ini biasa berasal dari pasangan kandidat, tim sukses, dan juga kalangan pengusaha dan kalangan tertentu yang memiliki kepentingan baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik, praktik politik uang ini tidak lepas dari terjalannya hubungan patron-klien dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>. Edi Nasution “*Perselingkuhan Anatar Politik dan Uang ( money politic ) Mencerдай System Demokrasi*” Jurnal Tempo.Co. 3 Oktober 2013

<sup>5</sup>. Fitriyah “*Cara Kerja Politik Uang ( Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati )*” Jurnal.,Politikal, Vol, 6. NO 2.Oktober 2015

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati “*Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientelisme pada pemilu legislative 2014)*” Tulisan ini memberikan contoh tentang berjalanya politik uang menurutnya pengaruh fitur pasangan calon dan visi misi hanya sebagian masyarakat mempertimbangkan hal itu sering kali masyarakat mempertimbangkan pemberian-pemberian pribadi untuk mendukung upaya pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan kerumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial, anggapan bahwa kadang pemberian sebagai kenang-kenangan. pemberian yang paling umum biasa dibedakan dalam beberapa katageori. sebagai contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda kecil (misalnya, kalender, dan gantungan kunci) yang disertai nama kandidat dan imej yang dibentuk untuk sang kandidat. contoh barang pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan, juga benda benda lainnya. diluar itu, masih banyak lagi jenis barang murah kecil-kecil lainnya yang biasa diberikan.<sup>6</sup>

Diana Ananda Rizki “*Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala (Daerah gubernur 2015-2020 provinsi kepulauan riau)*” Menurutnya politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya dengan cara tertentu pada

---

<sup>6</sup>. Edward Aspinall “*Politik Uang di Indonesia ( Partonase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislative 2014 )*” .Yogjakarta 2015

saat pemilihan umum, didalam pelaksanaan pada setiap pemilihan umum berlangsung setiap pasangan calon mengharapkan tidak terjadinya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon agar terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang kondusif, banyaknya kecurangan seperti praktik politik uang yang diberikan kepada masyarakat.pembelian suara dilakukan menggunakan uang atau barang, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang berperan penting dalam suatu pemilihan umum karena politik uang suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, pembelian biasa dapat menggunakan uang atau barang<sup>7</sup>.

Fitriyah “*Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada*” menurutnya fenomena politik uang dalam pemilu bukan hal yang baru, politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang makin permisif.pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan potensi korupsi namun juga akibatnya tercederanya suatu pemilu yang demokratis .persaingan yang ketat memeberikan wadah istimewa bagi kandidat yang paling berkuasa yang mempunyai akses dana cukup besar.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>. Diana Ananda Rizki “*Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kabupaten Riau*”. Skripsi.Jurusan Adminitrasi Negara Fisip Universitas Maritime Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

<sup>8</sup>. Fitriyah “*Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada* “ .Jurnal Hukum Volume XII. No 2013

Rahmatiah HL “*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*”, menjelaskan politik uang sangat rentan pada setiap penyelenggaraan pemilu termasuk pada pemilu legislatif. Pengetahuan politik yang rendah dan keadaan perekonomian menengah kebawah sangat sulit bagi masyarakat dapat terhindar dari politik uang, karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mereka para calon pemimpin melakukan berbagai macam cara agar menjadi pemenang dalam pemilihan dengan mengorbankan harta bedanya untuk membeli suara rakyat.<sup>9</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pilihan Rasional**

Teori yang digunakan peneliti adalah teori pilihan rasional. Salah satu tokoh yang konsen terhadap teori pilihan rasional adalah James.S.Coleman. teori pilihan rasional coleman tampak jelas dengan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan untuk menguntungkan sesuatu yang menurutnya menguntungkan diri sendiri. Terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang mempunyai tujuan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling tergantung atau sistematis terhadap tindakan mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>. Rahmatiah HL “*Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Gowa*” .Jurnal Fakultas Syariaiah dan Hukum UIN Makassar , Vol. No.2.2015

<sup>10</sup>. James s. coleman, “ *Dasar-Dasar Teori Sosial (Foundations Of Social Theory)*” Jakarta: Nusamedia, 2011

Teori ini memusatkan perhatian pada aktor. Aktor tersebut dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Inti dari penjelasan teori pilihan rasional adalah bahwa pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki hubungan satu sama lain, sebuah tindakan akan dikatakan rasional bila tindakan tersebut memiliki hubungan dengan pilihan, keyakinan yaitu, dalam artian bahwa tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang paling dapat memuaskan pilihan si pelaku sesuai dengan keyakinan yang ia memiliki dan dibuktikan secara *ex ante* dan bukan *ex post* (karena pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna, sehingga orang rasional tetap bisa melakukan kesalahan secara *ex post* (yaitu ketika dibandingkan dengan hasil nyatanya) biarpun *ex ante* yaitu sebelum dampaknya, diketahui, keputusannya sudah rasional) keyakinan akan dikatakan dengan bukti-bukti yang ada.

Untuk membuktikan bahwa sebuah tindakan adalah rasional, kita harus menunjukkan sebuah deret dimana tindakan tersebut dipandang atau dicarikan alasannya (yaitu penjelasan mengapa individu mengambil tindakan tertentu, mengapa individu memiliki keyakinan tertentu).

Asumsinya bahwasanya aktor dimaksudkan *money politic*. *money politic* yang sebagian besar dilakukan oleh tim sukses, serta partai politik usungan para kandidat pemilihan umum, sedangkan tujuan dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat khususnya masyarakat yang perekonomian dan pendidikan yang kurang memadai. hal tersebut bersifat timbal balik untuk mendapatkan keuntungan, baik aktor maupun tujuan. Dalam hal ini, saat aktor mendistribusikan berupa uang kepada pemilihan sesungguhnya beberapa mungkin berpikir bahwa mereka terikat kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada si pemberi sehingga membuat para penerima untuk memberikan pembalasan berupa hak pilihnya saat pemilihan umum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.<sup>11</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana pengaruh *money politic* di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana data dikumpulkan serta diolah dari

---

<sup>11</sup>. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011) hal 2

berbagai sumber literature yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang komprehensif dan valid secara ilmiah dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tentu saja diperlukan metode sebagai saran untuk memperoleh akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menelaah data yang relevan dengan topik kajian kemudian dianalisis.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang yaitu diperoleh secara langsung dilokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.<sup>12</sup>

### **b. Data Sekunder**

Adapun Data-data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui observasi dan studi kerperpusatakan untuk memperoleh landasan teori yaitu dengan membaca berbagai literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

---

<sup>12</sup>. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hal 209

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menurut sugiyono.<sup>13</sup> merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut.

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal. dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan di

---

<sup>13</sup>. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&K* (Jakarta: Alfabeta, 2011) hal, 224

<sup>14</sup>. A. Yusuf Muri, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Penelitian gabungan* (Jakarta: kencana, 2014), hal 372

gali, dan informan kunci yaitu masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang.

**b. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif,<sup>15</sup> observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan. Penulis dalam penelitian ini mengamati masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang.

**c. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) dilakukan peneliti di masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong,<sup>16</sup> Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena

---

<sup>15</sup>.Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal 206

<sup>16</sup>. *ibid*

adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan data. Terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup>

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mencatat hasil wawancara dan observasi terkait rumusan masalah yang akan di teliti masyarakat Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang

##### **b. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengancara sedemikian rupa sehingga

---

<sup>17</sup>. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabete, 2011, hal 231

kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi untuk di masukan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa. Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas. Dalam penelitian ini data yang di reduksi adalah pada temuan di lapangan yaitu hasil wawancara, dan hasil observasi langsung, dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokan dengan rumusan masalah.

### **c. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat di pahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang di sajikan harus sederhana dan dengan jelas agar mudah di baca. Data penulis berasal dari observasi dan wawancara yang sudah di reduksi kemudian di susun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan cara memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

#### **d. Penarik Kesimpulan**

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan katagori berbeda, maka penelitian pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil deskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarik kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

## **G. Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

Bab pertamaini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika bab.

### Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dimaksud ialah masyarakat di Kelurahan Keramasan Rt 03 Rw 01 Kecamatan Kertapati Palembang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) 2018 di Provinsi Sumatera Selatan

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III Berisi tentang deskripsi hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, pembahasan penelitian sesuai teori yang sudah di kemukakan di Bab II, Analisis data dan hasil temuan dalam bab ini membahas dan menjelaskan apa saja bentuk dari *money politic*, siapa saja menggunakan *money politic*, seperti apa strategi yang digunakan oleh para kandidiat untuk memperoleh perhatian-perhatian masyarakat serta, penyebab berjalannya *money politic* dan bagaimana metode penyebaran dari *money politic* itu sendiri.

#### Bab IV Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga akan menjawab pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian yang dilakukan, serta berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.